RUPA PARLEMEN KINI 15

A. DPR Baru, Perilaku Lama 16
B. Prolegnas dan Realisasinya 20
C. Karakter Legislasi 2010 36

RELASI DPR DENGAN LEMBAGA LAIN 39
A. Relasi DPR-Eksekutif: Pelaksanaan Fungsi Minim Substansi 39
B. Relasi DPR dan DPD: Periode Kisruh Prosedur 57
C. Relasi DPR dan KPK: Tenang Menimbun Dendam 58
D. Relasi DPR dan MK: Mengusung Pengawasan dan Perimbangan 63

MENYELAMI DPR 76
A. Menagih Akuntabilitas 76
B. Independensi Anggota dan Keterwakilan Perempuan . 81
C. Keterkaitan antara Kapasitas dan Kualitas 87
D. Efektivitas Peran Badan Kehormatan 89
E. Amnesia DPR Soal Keterbukaan Informasi 95
F. Kontribusi Melalui Inisiatif Individu 106

STUDI BANDING MINIM MAKNA 108
A. Studi Banding untuk Urusan Legislasi 111
B. Pembelokan Tafsir Aturan 112
C. Tak Menambah Kualitas 113
D. Publikasi Minimal 116

UANG RAKYAT UNTUK WAKILNYA 118
A. Pembangunan Gedung DPR 119
B. Dana Aspirasi 120
C. Rumah Aspirasi 122

KORUPSI BERPOLITIK 125
A. Ruang Negosiasi Korupsi Politik 125
B. Celah Korupsi Legislasi 129

KERANCUAN PEMBUAT DAN PELANGGAR UNDANG-UNDANG 133
A. Pelanggaran UUD 1945 Melalui Proses Seleksi Anggota KY 133
B. Tersanderanya Wakil Rakyat oleh Birokrat 138
C. Potensi Keterlambatan Pembuatan Peraturan Pemerintah 141

KUPAS UNDANG-UNDANG 2010 144
A. UU No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Cicak Lawan Buaya, Bukan Kegentingan yang Memaksa 145
B. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi: Berangkat dari Kegagalan Negara 150
C.UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Dari Perlawanan Balik sampai pembuktian Terbalik 155
D. UU NO. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Pemenuhan Hak Pejabat Tanpa Batasan Jelas 159

E. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Perubahan Penuh Tanda Tanya 165
F. UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka: Kerancuan Konsep Kepanduan 169
G. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura: Dari Kekhasan Hingga Kebangsaan 176
H. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pertanyaan Masyarakat Tidak Terjawab 181
I. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Awal Pemenuhan Janji 187
J. UU Pengesahan Perjanjian Internasional: DPR Bukan Tukang Stempel 193

AKHIR DARI CATATAN 203
A. Berharap pada 560 Wakil Rakyat 204
B. Prediksi Legislasi 2011 211